

2023

RENJA AKHIR



**DINAS PERIKANAN
KOTA DUMAI**



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

KETENTUAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke 2 (dua) dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. salah 1 (satu) bahan penyusunan Rancangan KUA PPAS, khususnya Program/Kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
 - b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2023, setelah tercantum dalam KUA PPAS.
- (4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; dan
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (5) Penjabaran Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

71

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Juli 2022

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI E

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kota Dumai yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja.

Diharapkan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kota Dumai pada masa sekarang dan yang akan datang.

Dumai, 6 Juni 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kota Dumai,



MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, MT
Pembina Tk.I
NIP. 19750313 199403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V PENUTUP	62

DAFTAR GAMBAR

1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai 22

DAFTAR TABEL

1.	Jumlah Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2021	8
2.	Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 Kota Dumai	9
3.	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2021	15
4.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai	23
5.	Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Sasaran Pembangunan Daerah	25
6.	Tabel T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Kota Dumai	26
7.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perikanan Kota Dumai	34
8.	Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026	37
9.	Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023	39
10.	Pemetaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023	48
11.	Rumusan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Renja merupakan salah satu dokumen penting dalam Laporan Kinerja (LK) yang perlu disusun dan sebagai jembatan antara Rencana Strategis (Renstra) dengan Laporan Kinerja (LK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Renja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara tahunan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen yang perlu mendapatkan perhatian guna mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan secara bertahap (Tahunan).

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat Daerah, Renja Dinas Perikanan Kota Dumai memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, karena:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), dan perencanaan

program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun selanjutnya.

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Walikota Dumai telah menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perikanan Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022.

Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang kelautan dan perikanan. Kemudian untuk melaksanakan tugas Dinas Perikanan Kota Dumai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai berdasarkan keputusan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembudidaya Ikan, yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Kenelayanan, yang terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Dumai.

Sebagai amanat tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Dumai sebagai Perangkat Daerah yang menyusun Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2021 nomor 4 seri E);
 10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perikanan Kota Dumai (Berita daerah Kota Dumai Tahun 2022 nomor 22 seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang di dalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Renja Dinas Perikanan Kota Dumai, antara lain:

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah dalam mencapai target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penyajian

Bentuk Penyajian Rancangan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kota Dumai tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimalnya memenuhi perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. Penutup.

Berdasarkan hal sebagai tersebut diatas Renja Tahun 2023 di susun secara sistematis sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu.dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan Dinas Perikanan Kota Dumai. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kota Dumai menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai selama tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan

data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai pada tahun anggaran 2021 dilakukan pada 4 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2022 dibiayai oleh APBD Kota Dumai sebesar Rp. 7.757.656.244,00. Realisasi dari kegiatan sampai dengan Desember 2021 adalah 90.50% atau sebesar Rp 7.020.642.459,00. Adapun penggunaan dana tersebut digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Anggaran Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jumlah Pendapatan	25.000.000,- 25.000.000,-
2.	Belanja Daerah Belanja Operasi	6.594.578.307,-
	> Belanja Pegawai	3.841.169.611,-
	> Belanja Barang dan Jasa	2.753.408.696,-
	Belanja Modal	1.163.077.937,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	513.077.937,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	430.000.000,-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	220.000.000,-
	Jumlah Belanja Daerah	7.757.656.244,-

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2021)

Evaluasi dan analisis kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021 beserta indikatornya dapat dijelaskan pada Tabel 2. Sedangkan realisasi keuangan dan fisik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Tabel T-C .29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 Kota Dumai

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Capaian Program/ Output Kegiatan)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 Kelompok							
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Untuk Izin Usaha Bidang Perikanan	1 dokumen							
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Untuk Izin Usaha Bidang Perikanan	1 dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Untuk Izin Usaha Bidang Perikanan	1 dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	25 kelompok							
Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah kali Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	8 kali	0	0	0	0%	8	8	200%
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	25 kelompok	0	0	0	0%	25	25	625%
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok yang Terpenuhinya biaya operasional pembinaan	10 kelompok	0.00	0.00	0.00	0%	10	10	250%
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan sarana pendukung pendamping (Unit)	7 unit	7	7	7	100%	7	21	525%
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Penertiban Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen							
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)	1 laporan	0	0	0	0.00%	1	1	25%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Capaian Program/ Output Kegiatan)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	12 bulan							
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Kota Dumai	1 dokumen	0	0	0	0	1	1	25%
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	1	1	1	100%	1	3	75%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	tersediannya pakan alami (Paket)	2 unit	2.00	2	2.00	100%	2	6	150%
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun (Kali)	30 kali	30	30	30	100%	30	90	2250%
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Operasional Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan (Kelompok)	25 Kelompok	25	25	25	100%	25	75	1875%
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah kegiatan Perencanaan Pengembangan Kawasan Shrimp Estate di Kecamatan Sungai Sembilan	1 kali	0	0	0	0%	1	1	25%
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kegiatan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk usaha budidaya ikan air tawar	1 kali	0	0	0	0%	1	1	25%
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aki	100 %							
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 dokumen							
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data pengolahan hasil perikanan (Data)	1 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan Teknis Penerapan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diikuti	15 ok							
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	15 ok	0	0	0	100%	15	15	375%
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan	4 kelompok							
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KUB Dinas Perikanan yang diberikan bantuan sistem rantai dingin	1 kelompok	0	0	0	100%	1	1	25%
PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina	20 kelompok							
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan sungai, Danau,Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat	Jumlah bulan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan sungai, Danau,Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya	12 Bulan							

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Capaian Program/ Output Kegiatan)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota									
Penyediaan Data dan Informasi sumber daya ikan	Jumlah bulan pendataan Produksi Perikanan Tangkap	12 Bulan							
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang diberikan Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	1 kelompok	0	0	0	0%	1	1	25%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok yang diberikan Bantuan Kapal Penangkapan Ikan	2 kelompok	0	0	0	0%	2	2	50%
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	18 kelompok							
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	18 Kelompok	0	0	0	0%	18	18	450%
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok yang diberikan Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan armada	3 Kelompok	0	0	0	0%	3	3	75%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	7 Kali							
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang disusun	1 Raperda	0	0	0	0%	1	1	25%
Pelayanan Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	Jumlah koordinasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kembali Menjadi Aset Pemerintah Dumai	6 Kali	0	0	0	0%	6	6	150%
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Pembuatan TDKP Nelayan Kecil Ukuran Kapal sampai 5 GT	1 Dokumen							
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen Draft peraturan tentang Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDKP Nelayan Kecil Ukuran Kapal Sampai 5 GT	1 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah surat rekomendasi pembuatan TDKP Nelayan Kecil Ukuran Kapal Sampai 5 GT	10 Surat	0	0	0	0%	10	10	250%
PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%							
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	12 Bulan							
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Operasional Pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	0	0	0	0%	12	12	300%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	14 Dokumen							

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Capaian Program/ Output Kegiatan)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
Kinerja Perangkat Daerah	kinerja perangkat daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	2 Dokumen	0	0	0	0%	2	2	50%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0	0	0	0%	2	2	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	7 Dokumen	0	0	0	0%	7	7	175%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan yang dibayar	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan /semesteran	3 Dokumen	0	0	0	0%	3	3	75%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Analisis Prognosis Anggaran	2 Laporan	0	0	0	0%	2	2	50%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan							
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*) (dokumen)	1 dokumen	1	1.00	1	100%	1	3	75%
	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Bulan)	12 bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit Pengamanan barang milik SKPD	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kali Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	1 Kali	0	0	0	0%	1	1	25%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	1 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan inventarisasi Aset	1 Dokumen	0	0	0	0%	1	1	25%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 Unit							

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Capaian Program/ Output Kegiatan)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas operasioanal atau lapangan	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Meubeleur kantor	15 Unit	0	0	0	0%	15	15	375%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	0 Unit	0	0	0	0%	0	0	0%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor lainnya	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik 3 unit kerja	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 Unit	0	0	0	0%	6	6	150%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum pada 3 unit kerja	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan lainnya (Bulan)	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah dan kabupaten dalam riau (Bulan)	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor	1000 Surat	1830	1000	1830	183%	1000	4660	116500%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi	12 Bulan	12	12	12	100%	12	36	900%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (Capaian Program/ Output Kegiatan)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
	perkantoran - Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9 Unit							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	10 Unit	10	10	10	100%	10	30	750%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	12	12	12	100%	12	36	900%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab secara rutin/ berkala	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/ direhab secara rutin/ berkala	1 Unit	0	0	0	0%	1	1	25%

Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	0.00	-	0.00	-	100	56,995,000	-	750,000	50	1,920,000	-	46,789,500	-	7,513,000	50	56,972,500	50.00%	99.96%	50.00	56,972,500	0.00%	0.00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja, penganggaran dan laporan kinerja yang tersusun (Dokumen)	0.00	-	0.00	-	8	56,995,000	-	750,000	4	1,920,000	2	46,789,500	2	7,513,000	8	56,972,500	100.00%	99.96%	8.00	56,972,500	0.00%	0.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan (7 Dokumen)	0.00	-	0.00	-	7	3,785,899,611	-	638,249,534	3	891,169,453	-	835,739,867	-	831,251,697	3	3,196,410,551	42.86%	84.43%	3.00	3,196,410,551	0.00%	0.00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	0.00	-	0.00	-	12	3,785,899,611	-	638,249,534	6	891,169,453	3	835,739,867	3	831,251,697	12	3,196,410,551	100.00%	84.43%	12.00	3,196,410,551	0.00%	0.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*) (%)	0.00	-	0.00	-	100	97,113,347	-	-	50	13,669,000	-	32,770,000	-	50,210,000	50	96,649,000	50.00%	99.52%	50.00	96,649,000	0.00%	0.00%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*) (dokumen)	0.00	-	0.00	-	1	97,113,347	-	-	-	13,669,000	-	32,770,000	-	50,210,000	-	96,649,000	0.00%	99.52%	0.00	96,649,000	0.00%	0.00%
		Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12		-	6	-	-	-	-	-	-	6		50.00%		6.00		0.00%	0.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah (100%)	0.00	-	0.00	-	100	300,191,207	-	12,518,700	50	46,408,900	-	102,699,362	-	137,741,038	50	299,368,000	50.00%	99.73%	50.00	299,368,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik 3 unit kerja (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	5,669,605	-	1,800,000	6	-	3	1,586,000	3	2,282,000	12	5,668,000	100.00%	99.97%	12.00	5,668,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12		-	6	3		3		3		12		100.00%		12.00		0.00%	0.00%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	83,997,130	-	-	6	-	3	29,632,000	3	54,364,000	12	83,996,000	100.00%	100.00%	12.00	83,996,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya logistik kantor pada 3 unit kerja (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12		-	6	3		3		3		12		100.00%	100.00%	12.00		0.00%	0.00%
		Tersedianya makan minum pada 3 unit kerja (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	12,992,000	-	1,696,000	6	1,354,000	3	440,000	3	9,502,000	12	12,992,000	100.00%		12.00	12,992,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	19,597,447	-	1,970,000	6	1,280,000	-	1,955,000	6	13,572,000	12	18,777,000	100.00%	95.81%	12.00	18,777,000	0.00%	0.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)			
			0.0	-	0.0	-	12																	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan lainnya (Bulan)	0.0	-	0.0	-	12	7,643,025	-	600,000	6	2,400,000	3	1,800,000	3	2,843,000	12	7,643,000	100.00%	100.00%	12.00	7,643,000	0.00%	0.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke luar daerah dan kabupaten dalam riau (Bulan)	0.0	-	0.0	-	12	170,292,000	-	6,452,700	6	41,374,900	3	67,286,362	3	55,178,038	12	170,292,000	100.00%	100.00%	12.00	170,292,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (100%)	0.0	-	0.0	-	100	1,081,156,996	-	98,303,524	50	308,411,658	-	295,165,631	-	364,378,741	50	1,066,259,554	50.00%	98.62%	50.00	1,066,259,554	0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi kantor (surat)	0.0	-	0.0	-	1000	1,300,000	-	100,000	40	100,000	40	100,000	1,030	1,000,000	1,830	1,300,000	183.00%	100.00%	1830.00	1,300,000	0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	0.0	-	0.0	-	12	226,800,000	-	26,909,524	6	36,546,658	3	22,778,631	3	139,870,741	12	226,105,554	100.00%	99.69%	12.00	226,105,554	0.00%	0.00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan, jasa kantor, tenaga operator komputer, jasa pelayanan umum, tenaga keamanan dan supir (Bulan)	0.0	-	0.0	-	12	853,056,996	-	71,294,000	6	271,765,000	3	272,287,000	3	223,508,000	12	838,854,000	100.00%	98.34%	12.00	838,854,000	0.00%	0.00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0.0	-	0.0	-	100	236,736,698	-	3,200,000	50	14,725,000	-	12,173,000	-	199,594,550	50	229,692,550	50.00%	97.02%	50.00	229,692,550	0.00%	0.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0.0	-	0.0	-	14	225,440,928	3	3,200,000	2	14,725,000	5	12,173,000	-	188,995,550	10	219,093,550	71.43%	97.18%	10.00	219,093,550	0.00%	0.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0.0	-	0.0	-	12	11,295,770	-	-	-	-	-	12	10,599,000	12	10,599,000	100.00%	93.83%	12.00	10,599,000	0.00%	0.00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			-		-		512,100,000						124,312,300		374,788,000		499,100,300		97.46%		499,100,300		0.00%
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			-		-		450,000,000						124,312,300		312,688,000		437,000,300		97.11%		437,000,300		0.00%
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Operasional pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil (Kelompok)	0.0	-	0.0	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	tersedianya perahu/kapal penangkap ikan (Unit)	0.0	-	0.0	-	2	420,650,000	-	-	-	-	1	124,312,300	1	283,338,000	2	407,650,300	100.00%	96.91%	2.00	407,650,300	0.00%	0.00%
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersediannya alat bantu penangkap ikan (Unit)	0.0	-	0.0	-	2	29,350,000	-	-	-	-	-	2	29,350,000	2	29,350,000	100.00%	100.00%	2.00	29,350,000	0.00%	0.00%	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		62,100,000								62,100,000		62,100,000		100.00%		62,100,000		0.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi						Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)			
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya a Operasional Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Kelompok)	0.00	-	0.00	-	18	62,100,000	-	-	-	-	18	62,100,000	18	62,100,000	100.00%	100.00%	18.00	62,100,000	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			-		-		1,159,600,400		4,192,450			295,902,199		812,276,870		1,112,371,519		95.93%		1,112,371,519		0.00%	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya a pembinaan kelompok pembudidayaan ikan (kelompok)	0.00	-	0.00	-	60	62,332,250	-	4,192,450	25	-	-	52,820,000	-	5,318,900	25	62,331,350	41.67%	100.00%	25.00	62,331,350	0.00%	0.00%
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan sarana pendukung pendamping (Unit)	0.00	-	0.00	-	7	62,332,250	-	4,192,450	-	-	5	52,820,000	2	5,318,900	7	62,331,350	100.00%	100.00%	7.00	62,331,350	0.00%	0.00%
		Terlaksananya a Operasional (Kali)	0.00	-	0.00	-	36	-	-	9	-	16	-	11	-	36	100.00%		36.00	-	0.00%	0.00%		
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (laporan)	0.00	-	0.00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan kelompok pembudidayaan ikan (Bulan)	0.00	-	0.00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			-		-		1,097,268,150		-			243,082,199		806,957,970		1,050,040,169		95.70%		1,050,040,169		0.00%	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana BBI (Unit)	0.00	-	0.00	-	1	848,958,050	-	-	-	-	1	104,612,549	-	742,273,650	1	846,886,199	100.00%	99.76%	1.00	846,886,199	0.00%	0.00%
	Penjaminan Ketersediaan pakan alami	tersediannya pakan alami	0.00	-	0.00	-	2	180,800,00	-	-	-	-	2	138,469,65	-	300,000	2	138,769,65	100.00%	76.75%	2.00	138,769,65	0.00%	0.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi						Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		
	Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Paket)						0					0							0					
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun (Kali)	0.00	-	0.00	-	30	37,510,100	-	-	-	-	-	30	34,384,320	30	34,384,320	100.00%	91.67%	30.00	34,384,320	0.00%	0.00%		
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Operasional Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan (Kelompok)	0.00	-	0.00	-	25	30,000,000	-	-	10	-	10	5	30,000,000	25	30,000,000	100.00%	100.00%	25.00	30,000,000	0.00%	0.00%		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			-		-		527,862,985					1,645,000		238,196,330		223,977,155		463,818,485	87.87%		463,818,485	0.00%		
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan (dokumen)	0.00	-	0.00	-	7	527,862,985	-	-	3	1,645,000	-	238,196,330	-	223,977,155	3	463,818,485	42.86%	87.87%	3.00	463,818,485	0.00%	0.00%	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data pengolahan hasil perikanan (Data)	0.00	-	0.00	-	4	527,862,985	-	-	1	1,645,000	2	238,196,330	1	223,977,155	4	463,818,485	100.00%	87.87%	4.00	463,818,485	0.00%	0.00%	
							7,757,656,244		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										98.24%	90.50%					
									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

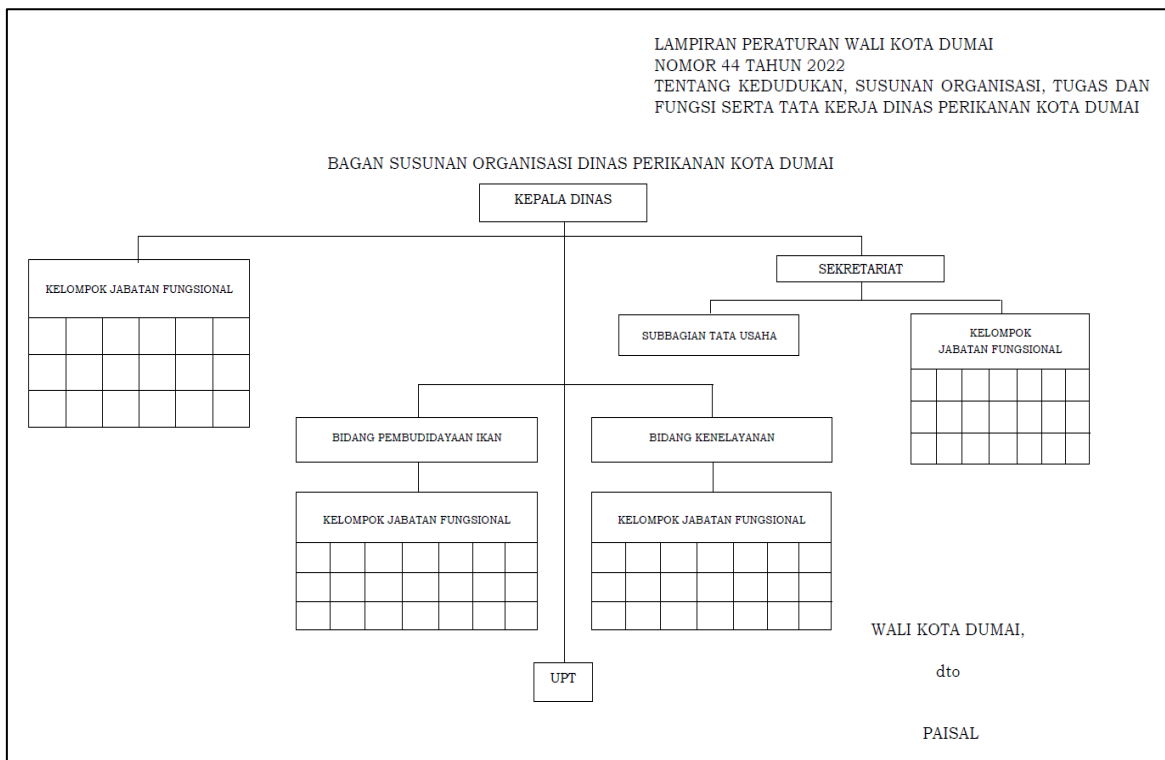
Pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pelayanan bidang teknis perikanan. Kinerja pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan agar menuju pelayanan yang prima, cepat dan murah, hal inilah yang menjadi target utama dalam segi pelayanan kedinasan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai, Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang perikanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi, yaitu sebagai berikut.

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari (1) kepala dinas, (2) sekretariat, (3) bidang pembudidayaan ikan, (4) bidang kenelayanan, (5) UPT. Bagan susunan organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kota Dumai

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dinas Perikanan Kota Dumai telah melaksanakan Program Kegiatan yang memprioritaskan pada peningkatan produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi ikan dengan memperhatikan sifat biologis ikan yang mudah membusuk jika tidak segera dilakukan penanganan. Disamping mencapai target produksi perikanan, nilai tambah produk tetap bisa dipertahankan. Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Dumai

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN RENSTRA DINAS PERIKANAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA DINAS PERIKANAN				REALISASI		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022 (perkiraan)	2023	2024
1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)		Produksi Perikanan (Ton)	627	994	1049	1108	1027.79	1027.79	994	1049
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	292.18	288	308	329	317.22	317.22	288	308
			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	334.77	706	742	778	710.57	710.57	706	742
			Cakupan Bina Kelompok Budidaya (kelompok)	40	31	34	37	25	25	31	34
			Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	37	18	20	22	18	18	18	20
			Angka Konsumsi Ikan (kg/Kapita/tahun)	42	42	42	42	45.19	46.25	42	42

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai (2021)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah bagaimana tugas dan fungsi perangkat daerah dapat mencapai target yang disesuaikan dengan target nasional seperti terwujudnya kedaulatan pangan, kemaritiman dan kelautan, kedaulatan energy, pembangunan daerah perbatasan, daerah tertinggal, pelayanan kesehatan, desa dan kawasan pedesaan, stabilitas keamanan dan ketertiban dan percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi.

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah akan terjadi kesulitan karena mengingat belum terukurnya beban kerja organisasi secara valid, analisa jabatan yang dibutuhkan belum tersusun, dan makin menurunnya nilai anggaran pembangunan yang dimiliki perangkat daerah.

Demikian juga isu tata kelola berdaya saing dan berkelanjutan merupakan isu yang bukan menjadi wewenang pemerintah daerah tetapi menjadi isu pemerintahan provinsi.

Pertukaran pimpinan daerah periode 2021-2026 juga akan merubah tujuan, sasaran, visi dan misi instansi, hal ini akan menimbulkan masa transisi yang akan mengkondisikan perencanaan lama kepada perencanaan yang baru.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Renja Dinas Perikanan Kota Dumai berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023.

Penjabaran prioritas pembangunan daerah terhadap sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Dumai dalam program pembangunannya dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program	Kinerja Tahun 2023	
			Indikator	Target
1.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan kelompok nelayan terbina	20 kelompok
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	cakupan kelompok aktif budidaya terbina	34 kelompok
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100%
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	persentase wilayah sampel AKI	100%

Pada Tabel 6, review terhadap rancangan awal RKPD dan mendasar pada isu-isu strategis yang berkembang saat ini, maka pagu anggaran pada rancangan awal RKPD masih disesuaikan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya penurunan kemampuan pembiayaan daerah akibat dari pandemi Covid-19.

Tabel 6. Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Kota Dumai

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	100 %	6,411,421,693	100 %	7,217,698,627
3	25	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	101,000,000	12 Dokumen	72,989,000
3	25	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	-
3	25	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	-
3	25	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	-
3	25	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	-
3	25	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	-
3	25	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	73,000,000	4 Laporan	72,989,000
3	25	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	-
3	25	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	25 Orang/Bulan	3,601,446,440	25 Orang/Bulan	3,018,181,368

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3	25	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	3,601,446,440	25 Orang/ Bulan	3,018,181,368
3	25	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	60,000,000	2 Dokumen	52,616,830
3	25	1	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	2 dokumen	60,000,000	2 dokumen	52,616,830
3	25	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	368,163,300	5 Dokumen	363,237,789
3	25	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	6,476,500	4 paket	6,458,400
3	25	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	122,000,000	4 paket	121,751,689
3	25	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	13,000,000	4 paket	12,990,000
3	25	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	14,966,800	4 paket	10,699,700
3	25	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	4 dokumen	6,720,000	4 dokumen	6,720,000
3	25	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	205,000,000	1 laporan	204,618,000
3	25	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit	759,000,000	12 Unit	501,108,206
3	25	1	2.1	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	0	1 Unit	125,208,000
3	25	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	154,000,000	6 unit	151,194,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3	25	1	2.1	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	15 unit	85,000,000	0 unit	-
3	25	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	4 Unit	24,824,270
3	25	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	350,000,000	1 Unit	199,881,936
3	25	1	2.1	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100,000,000	0 Unit	-
3	25	1	2.1	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	45,000,000	0 Unit	-
3	25	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	956,851,953	3 Laporan	913,503,330
3	25	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3,000,000	1 laporan	2,535,000
3	25	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	215,000,000	1 laporan	214,999,700
3	25	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	738,851,953	1 laporan	695,968,630
3	25	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	564,960,000	18 Unit	446,941,506
3	25	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	250,000,000	9 unit	134,778,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3	25	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	34,960,000	8 unit	32,680,000
3	25	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	280,000,000	1 unit	279,483,506
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina	20 %	532,891,752	20 %	213,726,500
3	25	3	2		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	1 Dokumen	74,996,399	1 Dokumen	-
3	25	3	2	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/ kota yang tersedia	1 dokumen	74,996,399	1 dokumen	-
3	25	3	2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	18 Kelompok	307,943,783	18 Kelompok	213,726,500
3	25	3	2	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	88,997,450	200 Orang	-
3	25	3	2	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	18 Kelompok	218,946,333	18 Kelompok	213,726,500
3	25	3	2		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	99,951,970	1 Dokumen	-
3	25	3	2	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 dokumen	49,998,970	1 dokumen	-
3	25	3	2	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	49,953,000	1 layanan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3	25	3	2		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi pembuatan TDKP Nelayan Kecil Ukuran Kapal Sampai 5 GT	30 Rekomendasi	49,999,600	30 Rekomendasi	-
3	25	3	2	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	30 rekomendasi	49,999,600	30 rekomendasi	-
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	31 %	3,533,227,028	31 %	1,560,394,798
3	25	4	2		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Untuk Izin Usaha Bidang Perikanan	25 Rekomendasi	29,500,000	25 Rekomendasi	-
3	25	4	2	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	25 rekomendasi	29,500,000	25 rekomendasi	-
3	25	4	2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina	25 Kelompok	1,095,677,580	25 Kelompok	690,953,879
3	25	4	2	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	25 kelompok	895,677,580	25 kelompok	690,953,879
3	25	4	2	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25 kelompok	50,000,000	25 kelompok	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3	25	4	2	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25 kelompok	150,000,000	25 kelompok	-
3	25	4	2		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	2 Dokumen	2,408,049,448	2 Dokumen	863,440,919
3	25	4	2	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	-
3	25	4	2	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	1 unit	446,011,952	1 unit	546,571,300
3	25	4	2	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	1 unit	525,998,700	1 unit	-
3	25	4	2	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	1 dokumen	296,035,000	1 dokumen	200,539,119
3	25	4	2	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	250 orang	240,000,000	250 orang	122,330,500
3	25	4	2	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1050.96 Ha	799,983,500	1050.96 Ha	-
3	25	4	2	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	20 orang	50,020,296	20 orang	-
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	100 %	49,999,630	100 %	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
3	25	5	2		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49,999,630	1 Dokumen	-
3	25	5	2	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	49,999,630	1 dokumen	-
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel AKI	100 %	219,990,334	100 %	74,999,300
3	25	6	2		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen	74,997,500	1 Dokumen	-
3	25	6	2	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen	74,997,500	1 dokumen	-
3	25	6	2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimbingan Teknis Penerapan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diikuti	5 unit usaha	49,995,650	5 unit usaha	-
3	25	6	2	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	49,995,650	5 Unit Usaha	-
3	25	6	2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku	1 ton	94,997,184	1 ton	74,999,300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal		Hasil Analisis Kebutuhan	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	industri pengolahan ikan				
3	25	6	2	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	75,000,000	1 Ton	74,999,300
3	25	6	2	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	19,997,184	2 Pelaku Usaha	-
TOTAL								10,747,530,437		7,217,698,627

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Membangun perikanan berkaitan erat dengan membangun sumber daya manusia perikanan khususnya pembudidaya ikan dan nelayan. Dinas Perikanan Kota Dumai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan. Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 di Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perikanan Kota Dumai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<p>Program: Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>Kegiatan: Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil</p>	Dumai	Jumlah Kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Rp. 690,953,879	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai urusan dalam penyelesaian rencana pusat yaitu urusan bidang kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembanunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pencapaian pembangunan dalam kurun waktu 2020-2024 masih menghadapi tantangan besar akibat dari pandemi Covid-19. Dampak yang dirasakan adalah terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentina kegiatan ekonomi terutama pada sektor industri pariwisata. Selain itu, dampak besar lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta menimbulkan gejolak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai dengan saat ini, pemerintah berupaya keras untuk mengendalikan keadaan, yaitu dengan cara melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2024.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020- 2024), visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri atas:

1. Penangkapan ikan terukur untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan;
2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal;
3. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi dalam negeri dan ekspor;
4. Pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, yang didukung dengan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
5. Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, arah kebijakan Provinsi Riau tahun 2023 adalah Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Adapun Visi Kota Dumai adalah **Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya**

Melayu. Untuk mewujudkan visi tersebut, didukung dengan Misi Kota Dumai, yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
5. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka Dinas Perikanan Kota Dumai mempunyai tujuan dan sasaran strategis beserta indikator capaiannya sesuai dengan Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2022-2026.

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	627	994	1.049	1.108	1.170	1.229
Sasaran: Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	292,18	288	308	329	352	377
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	334,77	706	742	778	818	853
	Cakupan bina kelompok budidaya	Kelompok	40	31	34	37	40	43
	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	37	18	20	22	24	26
	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	42	42	42	42	42	42

Sumber: Renstra Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Aktivitas instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi perangkat daerah

dengan dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Rencana kegiatan diimplementasikan secara maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

Program dan kegiatan merupakan strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, terkoordinasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Sejalan dengan visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu: **Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu** dan sesuai dengan Misi ke 1 Kota Dumai yaitu: **Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri**, maka penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Walikota Dumai ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 9.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 di Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Usulan Program/Kegiatan/SubKegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7,217,698,627		13,328,346,142				
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,368,578,029		6,742,712,716				
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					72,989,000		135,000,000				
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	3 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	4 Laporan	100 %	72,989,000	APBD	100 %	75,000,000
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,018,181,368		3,800,000,000		
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tercapainya PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	Dumai	100 %	25 Orang/ Bulan	100 %	3,018,181,368	APBD	100 %	3,800,000,000
3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							52,616,830		75,000,000		
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dumai	100 %	2 dokumen	100 %	52,616,830	APBD	100 %	75,000,000
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							363,237,789		402,612,716		
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	6,458,400	APBD	100 %	7,500,000
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	121,751,689	APBD	100 %	120,112,716
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	12,990,000	APBD	100 %	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	10,699,700	APBD	100 %	15,000,000
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 dokumen	100 %	6,720,000	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	204,618,000	APBD	100 %	225,000,000
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							501,108,206			634,000,000	
3	25	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	125,208,000	APBD	100 %	165,000,000
3	25	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	2 unit	100 %	151,194,000	APBD	100 %	97,000,000
3	25	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	15 unit	100 %	0	APBD	100 %	100,000,000
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	24,824,270	APBD	100 %	35,000,000
3	25	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	199,881,936	APBD	100 %	0
3	25	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	0	APBD	100 %	130,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target					
		dan perikanan	Lainnya yang Disediakan	Daerah												
3	25	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	7 Unit	100 %	0	APBD	100 %	107,000,000
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					913,503,330		1,071,100,000				
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	2,535,000	APBD	100 %	1,100,000
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	214,999,700	APBD	100 %	230,000,000
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	695,968,630	APBD	100 %	840,000,000
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446,941,506		625,000,000				
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	9 unit	100 %	134,778,000	APBD	100 %	310,000,000
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	8 unit	100 %	32,680,000	APBD	100 %	35,000,000
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dumai	100 %	1 unit	100 %	279,483,506	APBD	100 %	280,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
							direhabilitasi	Daerah								
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					0			150,000,000			
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/ kota yang tersedia	Tersedianya dokumen pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Dumai	20 %	1 dokumen	20 %	0	APBD	20 %	150,000,000
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					213,726,500			1,150,000,000			
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tercapainya jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	20 %	200 Orang	20 %	0	APBD	20 %	700,000,000
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Tercapainya jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	20 %	18 Kelompok	20 %	213,726,500	APBD	20 %	450,000,000
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					0			300,000,000			
3	25	3	2.03	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dumai	20 %	1 dokumen	20 %	0	APBD	20 %	200,000,000
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dumai	20 %	1 layanan	20 %	0	APBD	20 %	100,000,000
3	25	3	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0			75,000,000			
3	25	3	2.04	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Tersedianya rekomendasi pembuatan Tanda Daftar Kapal Perikanan Nelayan Kecil Ukuran Kapal sampai 5 GT	Dumai	20 %	30 rekomendasi	20 %	0	APBD	20 %	75,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,560,394,798		3,447,000,000	
3	25	4	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0		70,000,000	
3	25	4	2.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya jumlah rekomendasi untuk izin usaha bidang perikanan	Dumai	31 %	25 rekomendasi	31 %	0	APBD	31 %	70,000,000
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								690,953,879		1,173,000,000	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	Dumai	31 %	25 kelompok	31 %	690,953,879	APBD	31 %	843,000,000
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	Dumai	31 %	25 kelompok	31 %	0	APBD	31 %	80,000,000
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	Dumai	31 %	25 kelompok	31 %	0	APBD	31 %	250,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target					
				Pendidikan dan Pelatihan												
3	25	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					869,440,919		2,204,000,000					
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 dokumen	31 %	0	APBD	31 %	99,000,000
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 unit	31 %	546,571,300	APBD	31 %	525,000,000
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 unit	31 %	0	APBD	31 %	575,000,000
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 dokumen	31 %	200,539,119	APBD	31 %	127,000,000
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	250 orang	31 %	122,330,500	APBD	31 %	260,000,000
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1050.96 Ha	31 %	0	APBD	31 %	548,000,000
3	25	4	2.04	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	20 orang	31 %	0	APBD	31 %	70,000,000
3	25	5	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					0		150,000,000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dumai	100 %	1 dokumen	100 %	0	APBD	100 %	150,000,000
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							74,999,300		1,313,633,426		
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							0		458,310,000		
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Tersusunnya dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Dumai	100 %	1 dokumen	100 %	0	APBD	100 %	458,310,000
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							0		200,000,000		
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Tercapainya Bimbingan Teknis Penerapan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diikuti	Dumai	100 %	5 Unit Usaha	100 %	0	APBD	100 %	200,000,000
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							74,999,300		655,323,426		
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Dumai	100 %	1 Ton	100 %	74,999,300	APBD	100 %	455,323,426

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Terpenuhinya Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Dumai	100 %	2 Pelaku Usaha	100 %	0	APBD	100 %	200,000,000
TOTAL											7,217,698,627		13,328,346,142			

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai melalui Program dan Kegiatan Tahun 2023 merupakan rencana aksi Dinas untuk menguatkan kembali Produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Pada kondisi pemulihan ekonomi akibat dampak wabah pandemi Covid-19, sektor perikanan menjadi andalan dalam membangkitkan kembali roda perekonomian masyarakat.

Berdasarkan regulasi yang telah diberlakukan yaitu Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan penyesuaian/pemetaan program kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pemetaan program tersebut, maka dilakukan pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing-masing sub kegiatan. Berikut hasil pemetaan rencana kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

Tabel 10. Pemetaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase wilayah sampel aki
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen data Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan kelompok nelayan terbina
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/ kota yang tersedia
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat pelelangan Ikan (TPI)
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah	Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10

PPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang direncanakan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 7,217,698,627,- (*tujuh milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*). Adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut (Tabel 11).

Tabel 11. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target					
3																
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25													13,328,346,142		
3	25	1												6,742,712,716		
3	25	1	2.01											135,000,000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	3 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Dokumen	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000

Kode	Kategori	Sub Kategori	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target		
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	4 Laporan	100 %	72,989,000	APBD	100 %	75,000,000
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	100 %	1 Laporan	100 %	0	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,018,181,368		3,800,000,000		
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tercapainya PNS yang terdata dalam administrasi keuangan perangkat daerah	Dumai	100 %	25 Orang/ Bulan	100 %	3,018,181,368	APBD	100 %	3,800,000,000
3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							52,616,830		75,000,000		
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dumai	100 %	2 dokumen	100 %	52,616,830	APBD	100 %	75,000,000
3	25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							363,237,789		402,612,716		
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	6,458,400	APBD	100 %	7,500,000
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	121,751,689	APBD	100 %	120,112,716
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	12,990,000	APBD	100 %	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 paket	100 %	10,699,700	APBD	100 %	15,000,000
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	4 dokumen	100 %	6,720,000	APBD	100 %	10,000,000
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersusunnya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	204,618,000	APBD	100 %	225,000,000
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							501,108,206			634,000,000	
3	25	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	125,208,000	APBD	100 %	165,000,000
3	25	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	2 unit	100 %	151,194,000	APBD	100 %	97,000,000
3	25	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	15 unit	100 %	0	APBD	100 %	100,000,000
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	24,824,270	APBD	100 %	35,000,000
3	25	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	199,881,936	APBD	100 %	0
3	25	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Dumai	100 %	1 Unit	100 %	0	APBD	100 %	130,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target					
		dan perikanan	Lainnya yang Disediakan	Daerah												
3	25	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	7 Unit	100 %	0	APBD	100 %	107,000,000
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					913,503,330			1,071,100,000			
3	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	2,535,000	APBD	100 %	1,100,000
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	214,999,700	APBD	100 %	230,000,000
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	1 laporan	100 %	695,968,630	APBD	100 %	840,000,000
3	25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					446,941,506			625,000,000			
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	9 unit	100 %	134,778,000	APBD	100 %	310,000,000
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	100 %	8 unit	100 %	32,680,000	APBD	100 %	35,000,000
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Jumlah gedung kantor dan bangunan kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Dumai	100 %	1 unit	100 %	279,483,506	APBD	100 %	280,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
							direhabilitasi	Daerah								
3	25	3	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				0				150,000,000			
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu kabupaten/ kota yang tersedia	Tersedianya dokumen pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Dumai	20 %	1 dokumen	20 %	0	APBD	20 %	150,000,000
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				213,726,500				1,150,000,000			
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Tercapainya jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	20 %	200 Orang	20 %	0	APBD	20 %	700,000,000
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Tercapainya jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	20 %	18 Kelompok	20 %	213,726,500	APBD	20 %	450,000,000
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0				300,000,000			
3	25	3	2.03	1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dumai	20 %	1 dokumen	20 %	0	APBD	20 %	200,000,000
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dumai	20 %	1 layanan	20 %	0	APBD	20 %	100,000,000
3	25	3	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0				75,000,000			
3	25	3	2.04	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Cakupan kelompok nelayan terbina	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Tersedianya rekomendasi pembuatan Tanda Daftar Kapal Perikanan Nelayan Kecil Ukuran Kapal sampai 5 GT	Dumai	20 %	30 rekomendasi	20 %	0	APBD	20 %	75,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								1,560,394,798		3,447,000,000	
3	25	4	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0		70,000,000	
3	25	4	2.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya jumlah rekomendasi untuk izin usaha bidang perikanan	Dumai	31 %	25 rekomendasi	31 %	0	APBD	31 %	70,000,000
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								690,953,879		1,173,000,000	
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	Dumai	31 %	25 kelompok	31 %	690,953,879	APBD	31 %	843,000,000
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	Dumai	31 %	25 kelompok	31 %	0	APBD	31 %	80,000,000
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	tercapainya Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan kecil yang terbina	Dumai	31 %	25 kelompok	31 %	0	APBD	31 %	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
							Pendidikan dan Pelatihan									
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							869,440,919				2,204,000,000
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 dokumen	31 %	0	APBD	31 %	99,000,000
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 unit	31 %	546,571,300	APBD	31 %	525,000,000
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 unit	31 %	0	APBD	31 %	575,000,000
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1 dokumen	31 %	200,539,119	APBD	31 %	127,000,000
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	250 orang	31 %	122,330,500	APBD	31 %	260,000,000
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	1050.96 Ha	31 %	0	APBD	31 %	548,000,000
3	25	4	2.04	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	Jumlah pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Tersusunnya dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Dumai	31 %	20 orang	31 %	0	APBD	31 %	70,000,000
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota							0			150,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dumai	100 %	1 dokumen	100 %	0	APBD	100 %	150,000,000
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							74,999,300		1,313,633,426		
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							0		458,310,000		
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Tersusunnya dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Dumai	100 %	1 dokumen	100 %	0	APBD	100 %	458,310,000
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							0		200,000,000		
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Tercapainya Bimbingan Teknis Penerapan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan yang diikuti	Dumai	100 %	5 Unit Usaha	100 %	0	APBD	100 %	200,000,000
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							74,999,300		655,323,426		
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Dumai	100 %	1 Ton	100 %	74,999,300	APBD	100 %	455,323,426

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah sampel AKI	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Terpenuhinya Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	Dumai	100 %	2 Pelaku Usaha	100 %	0	APBD	100 %	200,000,000
TOTAL											7,217,698,627		13,328,346,142			

Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai

BAB V PENUTUP

Rancangan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Dokumen rancangan Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.

Rancangan Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

- a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.
- b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.
- c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023.

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahm bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Demikian gambaran tentang Renja Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2023, dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja untuk melaksanakan kegiatan Tahun 2023 yang akan datang. Diharapkan

penyusunan Renja ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas Perikanan Kota Dumai dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang.

Kepala Dinas Perikanan
Kota Dumai,



MURILIS SUZANTRI, S.Hut.T, MT
NIP. 19750313 199403 1 002